

**PUSH FACTOR PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM  
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK PEDESAAN (BUMDES)(STUDI KASUS  
FAKTOR PENDORONG PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM UPAYA  
MEMBANGUN BUMDES DI DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA  
KAB.PURBALINGGA)**

**Endang Dwi Sulistyoningsih**

FISIP Universitas Jenderal Soedirman

**ABSTRAK**

Wacana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pusat perhatian dalam pembangunan SDM di Indonesia, ini disebabkan karena sampai saat ini secara kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki, ini ditinjau dari berbagai indikator, salah satunya dari Angka Melek Huruf perempuan rendah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan rendah dan AKI yang masih tinggi. Partisipasi perempuan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia sangat strategis, khususnya dalam pengembangan Badan Usaha Milik Pedesaan (BUMDes). Perempuan sebenarnya bisa dilibatkan dalam pertanian yang berat seperti mengolah sawah, maupun ringan seperti mengolah pekarangan. Namun, pada kenyataannya peran perempuan di sektor pertanian sering dianggap kurang penting akibat budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menyebabkan pembagian kerja secara gender di bidang pertanian. Adanya pembagian pekerjaan yang pantas dikerjakan oleh wanita atau oleh pria saja, tetapi di lain pihak ada pekerjaan tertentu yang terbuka bagi kedua belah pihak, baik pria maupun wanita. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran, posisi, akses, manfaat, dan kontrol perempuan anggota BUMDes menyangkut kebijakan politik khususnya dalam pembangunan di sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu diketahui push factor dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes?. Partisipasi perempuan dalam pembangunan desa dan BUMDes di Desa Serang Kecamatan Karangreja Purbalingga hanya mungkin terjadi jika masyarakat berkesadaran dan terorganisir. Karena itu, perlu upaya untuk mendorong kaum perempuan di desa untuk berorganisasi dan berpolitik. Kaum perempuan harus diberikan keleluasaan berorganisasi di luar organisasi yang sudah ada. Implikasi dari partisipasi perempuan terhadap peningkatan kapabilitas perempuan adalah perempuan menjadi lebih aktif dalam pembangunan dengan perannya sebagai subjek pembangunan.

**Kata Kunci:** Push Factor, Partisipasi, Pemberdayaan, Perempuan, Pengembangan BUMDes

**PENDAHULUAN**

Pemberdayaan untuk memajukan perekonomian desa kini telah memiliki payung hukum yang mantap, yaitu Undang Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Dalam implementasinya, Undang Undang Desa memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: 1) pengakuan dan status hukum pada sistem pemerintahan setingkat desa yang beragam di Indonesia; 2) mendorong tradisi dan kebudayaan masyarakat; 3) mendorong partisipasi warga dalam pemerintahan desanya; 4) meningkatkan pelayanan untuk semua orang lewat lebih sanggupnya pemerintahan desa; 5) mendorong pembangunan oleh oleh warganya sendiri.

Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 4 menyebutkan Pengaturan Desa bertujuan untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Penetapan kebijakan desentralisasi desa tersebut memberikan ruang yang luas bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk perempuan dapat terlibat sebagai subyek dalam pembangunan desa. (UU Desa, 2014: 7). Namun, pada realitanya keterlibatan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal pada masing-masing desa.

Pemberdayaan pada hakikatnya mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah suatu usaha bagaimana perempuan memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan ketrampilan, akses untuk berprestasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberdayaan politik yaitu usaha bagaimana perempuan dapat memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Dan yang dimaksud dengan pemberdayaan psikologis yaitu usaha bagaimana membangun kepercayaan diri perempuan. Pembangunan pemberdayaan perempuan telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia secara terencana dan berkelanjutan sejak terbentuknya Menteri Muda Urusan Peranan Wanita hingga sekarang. Paradigma pemberdayaan perempuanpun telah bergeser dari pendekatan *women in development, gender and development* hingga *gender mainstreaming* (Tarjana, 2011:1).

Eksistensi desa saat ini tengah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian

perekonomian desa. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.

Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil usaha BUMDesa menurut UU Desa dimanfaatkan untuk Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial (UU Desa no 6 Tahun 2016 pasal 89: 65).

Kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun realitas kehidupan perempuan dalam pembangunan di Indonesia menunjukkan dominannya peran laki-laki. Padahal dalam hal ini perempuan Indonesia mempunyai kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan seringkali hanya dilihat dari partisipasi masyarakat secara umum tetapi jika dilihat dari perspektif gender belum tentu berhasil. Wacana pemberdayaan perempuan merupakan salah satu pusat perhatian dalam pembangunan SDM di Indonesia, ini disebabkan karena sampai saat ini secara kualitas perempuan masih tertinggal dari laki-laki, ini ditinjau dari berbagai indikator, salah satunya dari Angka Melek Huruf perempuan rendah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan rendah dan AKI yang masih tinggi (Hubeis, 2010 : 3).

Perempuan merupakan potensi dan aset desa yang memiliki peranan dalam peningkatan kesejahteraan umum. Pemerintah desa perlu memberikan perhatian serius untuk memberdayakan perempuan desa melalui pelibatan secara langsung maupun tidak langsung perempuan desa dalam proses kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia khususnya perempuan desa sangat mungkin dilakukan melalui berbagai kegiatan guna memberdayakan mereka secara ekonomi, sosial, politik dan psikologis. Pemberdayaan perempuan di pedesaan perlu adanya partisipasi dari mereka. Partisipasi melihat adanya keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil dan evaluasi (Cohen dan Uphoff dalam Prijono, 1996 :133)

Perempuan Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah desa. Contohnya dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Serang memiliki porsi yang cukup besar untuk pembangunan fisik maupun belanja pegawai namun dukungan dana untuk kegiatan BUMDes di desa masih mendapatkan porsi yang minim. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya perempuan desa masih kurang. Pemerintah desa juga kurang serius dan intensif memberikan motivasi dan kesempatan bagi perempuan desa untuk terlibat dalam pembangunan desa. Dominasi laki-laki dalam rapat RT/RW, dusun hingga desa sangat nampak. Akibatnya, kebijakan pembangunan desa kurang memperhitungkan keberadaan perempuan meskipun secara pribadi memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Perempuan seharusnya diberikan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan serta memberikan akses kepada kontrol pembangunan. Mengingat bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan menimbulkan persepsi atau pandangan yang berbeda antar individu, ditambah lagi adanya beban ganda yang dipikul perempuan, maka yang ingin diteliti di sini adalah bagaimana para perempuan menggunakan kesempatan yang ada untuk berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes.

Keterlibatan perempuan dalam BUMDes diharapkan akan memunculkan kebijakan/keputusan yang peduli terhadap pemenuhan kebutuhan perempuan. Lebih jauh terdapatnya akses dan kontrol perempuan dalam kelembagaan khususnya dalam penyusunan program dapat mempengaruhi kehidupan perempuan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Perempuan yang dilibatkan dalam perencanaan dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas kebutuhan dasar perempuan yang seringkali terlewatkan (terlupakan) ketika penyusun rencana kegiatan adalah kaum laki-laki. Berdasarkan latar belakang diatas akan dikaji *push factor* dan faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan**

Menurut Hubeis (2010 : 150) faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/skill (psikomotorik), dan mental

(afektif). Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan eksternal yang diharapkan menjadi sesuatu yang kondusif bagi upaya pemberdayaan perempuan.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan (Sofyan, 2003). Langkah ini akan terealisasi ketika perempuan mendapat „ruang“ dalam aspek-aspek kegiatan baik dalam peran domestik maupun publik. Adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berperan akan menghasilkan manfaat yang besar karena mereka bisa saling mendukung sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki baik perempuan maupun laki-laki.

## **2. Pemberdayaan Perempuan**

Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal. Menurut data BPS tahun 2014 perempuan bekerja disektor primer pertanian 44,62 persen, sektor sekunder (perdagangan, keuangan ) sebesar 28,57 persen. seangkan tersier (industri 28,577 persen). dan kesenjangan dengan laki-laki banyak terjadi pada sektor primer.

Mengukur pemberdayaan perempuan perlu memperhatikan lima dimensi di bawah ini

1. Dimensi kesejahteraan dapat diukur dengan mengetahui terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya. Perempuan desa yang terpenuhi kebutuhan makanan, kesehatan dan perumahan secara layak dapat dikatakan telah mencapai kesejahteraan. Sebaliknya apabila belum terpenuhi kebutuhan tersebut dapat dikatakan belum sejahtera.
2. Dimensi akses atas sumberdaya dengan mengukur akses terhadap modal, produksi, informasi, keterampilan dan lainnya. Perempuan memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan modal usaha untuk memproduksi barang atau jasa serta mendapatkan informasi untuk mengembangkan usahanya serta mengasah keterampilan maupun bakat yang dimiliki perempuan.

3. Dimensi penyadaran atau kesadaran kritis untuk mengetahui ada tidaknya upaya penyadaran terhadap adanya kesenjangan gender yang disebabkan faktor sosial budaya yang sifatnya dapat dirubah. Upaya penyadaran tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat umum maupun perempuan desa yang memiliki pemahaman kritis terhadap konsep gender. Sehingga faktor sosial budaya yang menghambat dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Kesadaran kritis tentang gender perlu dibangun secara berkelanjutan.
4. Dimensi partisipasi yaitu untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dalam partisipasi yang ditunjukkan oleh terwakili atau tidaknya perempuan dalam wadah atau lembaga yang terkesan elite. Perempuan desa harus ada yang duduk di lembaga elite pemerintahan desa. Sehingga dapat memyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan desa.
5. Dimensi kontrol untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap alokasi kekuasaan pada segala bidang kegiatan. Dimensi kontrol ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat umum maupun perempuan untuk memastikan kepentingan perempuan terwadahi di segala bidang kehidupan.

### **3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut pasal 87 UU Desa No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa, BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, 2014 :67)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat desa dan kepengurusanya terpisah dari pemerintah desa. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk menggali dan mengoptimalkan potensi wirausaha desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*” turut menjadi pondasi penting dalam pendirian BUMDes. Dalam UU Desa, BUMDes didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan

bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya BUMDes dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2). Bentuk Badan Usaha Milik Desa harus berbadan hukum (ayat 3). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dalam hal ini adalah untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal Desa Serang sehingga dapat menemukan dampak adanya kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi masyarakat desa khususnya partisipasi perempuan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:9) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di Desa Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Lokasi penelitian dipilih karena desa ini merupakan salah satu desa yang mempunyai BUMDes di Kabupaten Purbalingga. Selain itu di Desa Serang juga telah menerima banyak pelatihan-pelatihan BUMDes terakhir ini dan beberapa kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan, termasuk masyarakat perempuan, sehingga dapat dilihat atau dinilai seberapa jauh faktor pendorong partisipasi perempuan dalam pengelolaan BUMDes.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan Melalui BUMDes Desa Serang**



BUMDes Desa Serang sejak pertama kalinya disahkan sudah banyak masyarakat yang menggunakan layanan tersebut, dan sampai sekarang jumlah konsumen terus meningkat. Meningkatnya jumlah konsumen otomatis akan menambah pendapatan bagi BUMDES sehingga laba setiap tahunnya meningkat. Dalam hal partisipasi masyarakat, pemerintah desa berusaha melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan di desanya. Keterlibatan masyarakat ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan dan evaluasi. Pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* dalam masyarakat. Kepala dusun dan tokoh masyarakat memegang peran penting untuk mendistribusikan ide, gagasan, manfaat pembangunan ini kepada warga sehingga muncul komitmen seluruh warga untuk terlibat dalam gotong royong pembangunan sarana dan prasarananya.

Pemerintah Desa Serang, Kecamatan Karangreja terus berupaya mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), saat ini BUMDes Serang mengelola 5 unit usaha. Yakni pariwisata, pertanian, peternakan, air bersih, dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dari semua unit usaha itu, baru unit pariwisata yang sudah menghasilkan keuntungan. Sementara untuk LKM sudah jalan namun belum mendapat keuntungan melainkan baru sebatas break even point (BEP) atau balik modal. Demikian pula dengan unit pertanian sudah jalan tetapi belum ada pendapatan (Suara Merdeka.com, 31 Oktober 2013).

**Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Desa dan Penggunaannya (Ha) Kecamatan Karangreja 2014**

No.	DESA/KEL.	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Serang	0,000	1.309,222	1.309,22
2	Kutabawa	0,000	762,000	762,00
3	Siwarak	10,000	613,660	623,66
4	Tlahab Lor	170,899	530,161	701,06
5	Tlahab Kidul	110,000	484,049	594,05
6	Karangreja	36,020	394,429	430,45
7	Gondang	45,650	450,370	496,02
	Hutan Negara	0,000	2.554,620	2.554,62
	Jumlah	372,57	4.543,89	4.916,46

Sumber: Statistik Kecamatan Karangreja, 2015

Berdasarkan Statistik Kecamatan Karangreja 2015 sektor pertanian dilahan kering dimiliki sebagian besar oleh Desa Serang seluas 1.309.222 Ha. Hal ini juga masih mendominasi lapangan usaha penduduk di Kecamatan Karangreja yaitu sebanyak 18.611



jiwa atau 68,72% dari jumlah usia kerja. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan sumber penghasilan utama masyarakat, didukung kondisi alam yang strategis, berada pada kaki Gunung Slamet memberikan kemudahan tumbuh tanaman hortikultura terutama jenis sayuran. Setelah sektor pertanian, sektor industri menempati posisi kedua yaitu 5.068 jiwa atau 18,71%, hal ini disebabkan banyaknya perusahaan asing yang melakukan Investasi di Kabupaten Purbalingga seperti industri bulu mata palsu, industri wages, dan lain-lain. Sedangkan Pengusaha dan Perdagangan, yaitu sebesar 3.750 jiwa atau 13,85%, sedangkan sisanya berada pada sektor jasa, konstruksi dan lain-lain. (Statistik Kecamatan Karangreja, 2015)

Setelah adanya kebijakan BUMDes dan diterapkan di Desa Serang, kondisi masyarakat mulai ada perubahan. Pengembangan BUMDes di pedesaan telah membuka peluang usaha bagi masyarakat. Misalnya industri pertanian agro wisata (*farm industry*) seperti kebun strawberry yang sangat meningkat. Pada tahun 2014 sampai tahun 2016 sebanyak lebih dari 600 pekerja kini terdapat pada unit ini. Dengan demikian pengangguran di Desa Serang jauh berkurang, dan ekonomi meningkat. Tingkat kesejahteraan dari tahun 2013 sampai 2016 mengalami peningkatan.

Pemberdayaan masyarakat bertalian erat dengan upaya penanggulangan masalah-masalah pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Upaya memberdayakan masyarakat tersebut harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.

Pemberdayaan masyarakat Desa Serang dilakukan dengan cara pemberian motivasi, pendidikan dan pelatihan serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki agar dapat berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan desa sehingga berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Di desa Serang seringkali mengundang ahli dari luar untuk memberikan pelatihan, hal tersebut dilakukan secara rutin untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam memanfaatkan BUMDes dan mengembangkannya sehingga dapat tercipta banyak peluang usaha bagi masyarakat.

3) Memberdayakan juga berarti melindungi.

Di dalam masyarakat Desa Serang banyak terdapat perbedaan, tidak semua masyarakat memiliki *skill* yang sama. Oleh karena itu perlu adanya intervensi dari pemerintah desa untuk melindungi masyarakat yang lemah agar tidak bertambah lemah yaitu dengan cara

terus memberi pengertian mengenai BUMDes agar masyarakat yang tidak tau menjadi tau dan ikut berpartisipasi dalam pemanfaatan BUMDes.

Setelah diterapkannya BUMDes di Desa Serang dan melihat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi, banyak dampak yang diberikan kepada desa dan masyarakat desa. Pembangunan di desa semakin meningkat. BUMDes di Desa Serang ini dinilai sudah berhasil dijalankan meskipun belum semua unit berjalan efektif. Keberhasilan inisiatifnya tidak luput dari kerja keras dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dengan memanfaatkan BUMDes, kondisi masyarakat yang dulunya miskin sekarang kehidupannya lebih terjamin, kesejahteraan masyarakat meningkat, pengangguran berkurang, kesehatan lebih baik dan banyak pembangunan yang dilakukan yang berorientasi masyarakat.

Pemerintah desa dalam menciptakan unit-unit BUMDes ini sangat melihat kebutuhan masyarakat. Di Desa Serang partisipasi masyarakat begitu tinggi, pembangunan dilakukan secara gotongroyong, desa memiliki potensi yang dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat dengan melihat kondisi masyarakat lalu menanggulangnya dengan membangun suatu sumber air bersih yang memberi dampak bagi kehidupan masyarakat Desa Serang.

Aktivitas BUMDes yang melibatkan banyak tenaga kerja diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan unit-unit BUMDes mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut.

Aktivitas BUMDes memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kegiatan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain:

- 1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- 2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain:

- 1) Kegiatan pembangunan sumber daya masyarakat desa
- 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat

3) Penyerapan tenaga kerja lokal

4) Penyuluhan dan pelatihan mengenai pertanian, kesehatan dan pengelolaan BUMDES

Selain banyaknya dampak positif bagi perekonomian di pedesaan, BUMDES juga telah banyak berdampak pada kesehatan masyarakat yang lebih baik juga berpengaruh positif terhadap pembangunan pemukiman berbasis masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Serang meningkat dengan adanya kebijakan mengenai BUMDes.

Apabila keberhasilan BUMDes Serang dalam mensejahterakan masyarakatnya ini dapat diikuti oleh seluruh desa yang ada di Indonesia maka kemajuan ekonomi nasional akan tercapai, karena kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang sih dari ekonomi pedesaan yang kuat.

## **2. Faktor Pendorong (Push Factor) Partisipasi Perempuan dalam Proses Pemberdayaan Melalui BUMDes Desa Serang.**

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan memiliki faktor-faktor tertentu sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat. Adapun faktor-faktor tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

### **Faktor pendorong (Push Factor)**

BUMDes Desa Serang menjadi pembuka bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan melalui pemberdayaan. Hal ini diperkuat dengan persyaratan dalam manajemen program yang mengharuskan adanya keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan, apalagi dari segi kuantitas perempuan di Desa Serang lebih banyak daripada laki-laki.

Kemauan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes yang hadir di Desa Serang tidak lepas dari adanya faktor pendorong. Adapun faktor pendorong partisipasi perempuan antara lain :

#### **a. Kesadaran perempuan untuk membangun desa**

Pengurus kegiatan-kegiatan dalam BUMDes merupakan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan kepedulian untuk berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan perempuan yang ikut terlibat dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes, mereka mengaku bahwa menjadi bagian dari kegiatan ini bukanlah hal yang

mudah, sehingga benar-benar diperlukan suatu kesadaran untuk menjadi faktor awal sebagai pendorong untuk melibatkan diri.

Hal ini seperti penuturan Ibu Fauziana selaku anggota BUMDes:

*“Saya punya keinginan dan motivasi. Motivasi ikut ke Usaha desa ini untuk membangun masyarakat di Desa Serang ini karena saya di sini kan juga sebagai warga asli sini, jadi saya ingin menyumbangkan tenaga di sini untuk kemajuan desa. Ya untuk kepentingan bersama lah mbak”*

Dari penuturan di atas tampak bahwa memiliki kesadaran untuk membangun atau memajukan desa dapat mendorong perempuan untuk ikut terlibat. Hal ini juga sesuai dengan penuturan Ibu Sunarti

*“kegiatan ini sih sebenarnya kegiatan yang pada awalnya memang sukarela, kegiatan yang membutuhkan tingkat kesadaran tinggi dari masyarakat untuk dapat membangun Desa menjadi lebih maksimal. Pada awalnya saya kurang paham, kog katanya BUMDesitu dapat membantu memajukan Desa. Nah dari sini saya merasa kalau saya menjadi bagian dari masyarakat yang juga akan merasa senang kalau dapat membantu membangun Desa. Jadi saya terlibat dalam BUMDes ini walaupun ya jadi tenaga mbantu”.*

Kesadaran untuk membangun atau memajukan Desa merupakan faktor utama yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi. Hal ini juga senada dengan penuturan Ibu Indah Dwi selaku anggota BUMDes bidang pariwisata :

*“Ya seperti tadi, kalau Desanya maju kan semua ikut senang, jadi yang membuat saya untuk ikut bergabung dalam BUMDes ya karena saya ingin memberikan kontribusi untuk kemajuan Desa Tanjungkarang ini. Selagi saya mampu ya saya mau untuk membantu”.*

#### **b.Faktor dukungan dari suami**

Keterlibatan perempuan dalam BUMDes di Desa Serang dilengkapi adanya dukungan dari suami. Dalam hal ini, berkaitan dengan konsep sosial gender yang patriarkis yang dianut oleh masyarakat Jawa. Secara tradisi, peran masing-masing anggota keluarga sangat ditentukan oleh struktur kekuasaan laki-laki (suami) sebagai kepala keluarga yang secara hierarkis memiliki kewenangan paling tinggi dalam keluarga. Kondisi seperti ini akan berpengaruh pada keterlibatan perempuan dalam kepengurusan BUMDes, karena dengan adanya dukungan atau ijin dari suami mereka dapat lebih leluasa untuk mengaktualisasikan diri dalam mewujudkan pembangunan

atau kemajuan Desa Serang secara lebih maksimal. Hal ini sesuai dengan penuturan Ibu Sumarti selaku anggota BUMDes

*“Mengapa saya beranikan diri untuk iyalah saya siap ikut BUMDes karena saya merasa oh sampai saya berarti saya masih ada kepercayaan dimasyarakat ini, jadi akan saya buktikan saya bisa untuk ikut memajukan Desa Serang. Dan alhamdulillah suami saya juga mendukung”*

Penuturan Ibu Sumarti di atas juga sesuai dengan penuturan Bapak Mawardi selaku suami Ibu Sumarti :

*“Selama kegiatan yang ditekuni istri saya merupakan kegiatan yang positif ya tak dukung mbak. Apalagi ini kan kerja itu kan untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan Desa Serang juga, jadi saya ya malah senang kalau istri saya berhati mulia seperti itu, mau membagi waktunya untuk kepentingan Desa juga, tapi ya asal ojo nganti keteteran ngurus anak juga”*

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam BUMDes masih berada di bawah kontrol laki-laki. Istri boleh ikut berpartisipasi dengan adanya syarat yang telah ditentukan oleh suami, yakni mengenai tugas utama seorang istri dalam mengurus anak. Jika suami tidak memperbolehkan istri, maka istri tidak akan ikut berpartisipasi dalam BUMDes

Hal ini seperti penuturan Ibu Sutinah:

*“Kalau seandainya suami saya tidak mengizinkan ya saya tidak berani ikut. Ikut perintah suami saja. Tapi ini kan alhamdulillah suami saya mendukung. Suami kerja saya ya juga kerja buat mbantu nafkah juga anak-anak kan sudah besar jadi ga begitu repot”*

### **c. Adanya kesempatan keterlibatan perempuan**

Kehadiran BUMDes Desa Serang merupakan suatu kesempatan bagi perempuan untuk ikut serta dalam berpartisipasi. Hal ini seperti penuturan Ibu Lia selaku anggota:

*“Saya merasa senang di desa sendiri sudah ada kemajuan ya itu usaha desa, walaupun belum mencukupi kebutuhan ya alhamdulillah kalau musim liburan ramai pengunjung, bisa dapat hasil lumayan lah buat anak sekolah jajan”*

Penuturan Ibu Narti juga senada dengan penuturan Ibu Lia selaku anggota

*“betul banget ada pekerjaan di desa sendiri ada wisata strawberry, simpan pinjem lumayan mba, dadi terkenal kalau desa sudah maju, masyarakat toh ikut juga maju mbok”*

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa adanya kesempatan bagi keterlibatan perempuan juga menjadi faktor pendorong partisipasi perempuan, khususnya adalah perempuan yang ikut bekerja sebagai tambahan penghasilan atau penghasilan utamanya. Melalui keterlibatannya ke dalam anggota mereka merasa

mempunyai kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, karena selain mereka mendapatkan penghasilan, mereka juga menjadi tahu kalau daerahnya akan ikut berkembang dan maju seiring dengan pekerjaan mereka menjadi pemberdaya di desanya

Keterlibatan perempuan tidak lepas dari adanya faktor pendorong. Adapun faktor pendorong partisipasi perempuan adalah tambahan penghasilan, tetapi dalam penelitian ini lebih khususnya adalah dukungan dari suami. Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan hasil tambahan, yakni adanya kesadaran perempuan untuk membangun desa, dan adanya kesempatan keterlibatan perempuan.

### **Faktor penghambat**

Keterlibatan atau partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes ini tidak hanya berlandaskan pada faktor pendorong saja, tetapi dalam keterlibatannya mereka juga mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala ini kemudian akan diuraikan sebagai sub faktor penghambat partisipasi perempuan dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes Desa Serang yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Beban ganda yang dimiliki perempuan**

Dalam kegiatannya sehari-hari, perempuan yang ikut terlibat dalam bekerja di BUMDes, perempuan yang juga mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Beban ganda ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi keterlibatan perempuan, karena keterlibatan mereka dalam proses pemberdayaan melalui BUMDes.

Hal ini seperti penuturan Ibu Fauziana selaku anggota:

*“Kendala yang saya hadapi ya memang dalam membagi waktu mbak. Saya kan ngurus keluarga juga, jadi pada waktu saya masih ikut kerja yang kemarin itu kerjanya shift-shift’an mbak, terkadang sampai malam juga. Saya rasa kendalanya ya seperti itu.”*

Hal diatas tampak tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki beban ganda sehingga dalam mengaktualisasikan diri dalam ranah pembangunan terhambat oleh faktor tersebut. Hal ini juga senada dengan penuturan Bapak Kepala Desa sebagai penanggung jawab BUMDes

*“Kan sudah diniati ya, jadi pandai-pandainya saya harus bisa membagi waktu. Misalnya pagi sudah urus anak-anak, rumah kegiatan rumah, setelah itu berangkat kerja. Yo seperti itulah.”*

Penuturan Ibu Lia juga senada dengan penuturan Ibu Fausiana selaku anggota :

*“kerjaku yang penting ikhlas bismillah bantu keluarga walaupun ya berat juga ngurus ini itu wis lah komplit.”*

Dari hasil temuan di lapangan seperti yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa menjadi bagian dari BUMDes merupakan pekerjaan yang tidak mudah, sehingga dalam pelaksanaannya mereka terhambat oleh kendala yang salah satunya adalah beban ganda yang mereka miliki sebagai seorang perempuan. Dalam temuan di lapangan, pada umumnya perempuan di sini juga sebagai pekerja untuk mencari nafkah. Perempuan tidak hanya bekerja di sektor domestik saja tetapi juga berperan dalam menopang ekonomi keluarga (produktif). Tetapi, beban ganda yang di pikul oleh perempuan tidak serta merta menjadi penghambat yang menghentikan partisipasi mereka.

## **PENUTUP**

Kapabilitas dalam penelitian ini merupakan suatu kemampuan perempuan dalam menjadi agen pembangunan untuk kemajuan di Desa Serang. Perempuan akan mempunyai kapabilitas sebagai subjek pembangunan atau agen penggerak pembangunan. Sehingga jika anggapan bahwa selama ini yang menjadi subjek pembangunan adalah laki-laki, maka ketika perempuan dilibatkan dalam pembangunan, ia akan mempunyai kapabilitas sebagai subjek pembangunan atau agen penggerak pembangunan.

Dalam penelitian ini, diketahui juga bahwa partisipasi perempuan juga masih tetap dikontrol oleh kedudukan laki-laki (suami). Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam BUMDes Desa Serang dilaksanakan atas dasar adanya ijin dari suami, akan tetapi masih terikat oleh syarat yang telah ditentukan oleh suami. Dalam hal ini, suami mengizinkan perempuan ikut berpartisipasi asalkan mereka tetap mengutamakan urusan domestik seperti mengurus anak. Hal ini berarti bahwa perempuan belum memiliki kuasa untuk mengubah posisi diri.

Berdasarkan atas uraian di atas menunjukkan bahwa adanya tingkat partisipasi perempuan yang berbeda-beda, juga akan menimbulkan adanya kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan berbeda-beda pula. Perempuan yang mempunyai beban ganda dan terikat oleh kontrol suami, menjadikan kapabilitas perempuan sebagai subjek pembangunan menjadi kurang maksimal. Hal ini terkait dengan intensitasnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan. Perempuan yang mempunyai tingkat beban ganda lebih tinggi seperti halnya dalam mengurus urusan domestik (mengurus kegiatan rumah, mengurus anak, mengurus suami, mencari nafkah), tingkat kapabilitasnya sebagai subjek pembangunan akan menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang tingkat beban gandanya lebih kecil seperti halnya pada perempuan yang belum menikah atau belum mempunyai suami dan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyani. 2011. *Partisipasi perempuan dalam Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)*.
- Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*. Terjemahan Susetiawan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Davis, Keith, 1990, *Perilaku dalam Organisasi*; Jakarta: Erlangga.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi UNIBRAW. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. Jakarta: Pimpinan Pusat Relawan
- Endarwati, Lies. 2002. Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Usaha Koperasi Unit Desa (KUD). *Humaniora* 7.1 : 95-112.
- Fakih, Mansour. 2004. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti. 2002. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Hikmat, Harry. 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Desa, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disertai Penjelasannya*. Yogyakarta : Pustaka Mahardika.
- Hubeis, Aida Vitayala. 2010. *Pemberdayaan*. Bogor:IPB Press.
- Ife, Jim dan frank Tesoriore. 2008. *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Korten, C. David. 2002. *Menuju Abad ke 21 : Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Luthfi, Asma, dkk. 2011. *Paradigma Pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan dan Implikasinya Bagi Peningkatan Kesadaran Kritis Masyarakat di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang* : FIS UNNES.
- Moleong, Lexy. 2002. *Motodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Rinawati, arini. 2010. *Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antarpribadi*. Prosiding, Edisi Sosial.
- Sofyan Syukrie Erna, 2003, *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*.
- Sofiani Triana, 2009, *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*, Jurnal Muwazah, (I,1), Januari – Juni, hal 63-71 .
- Statistik Kecamatan Karangreja, Purbalingga, 2015.BPS: Pubalingga
- Sukidjo. 2009. Strategi Pemberdayaan Kemiskinan Pada PNPM Mandiri. *Cakrawala Pendidikan*, Juni 2009, Th. XXVIII, No. 2.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Susanti, Melly. 2012. *Problematika Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Vokasi di Desa Kledung Kecamatan Kledung Kabupaten Semarang*. Semarang : FIS UNNES.
- Tarjana, Sri Samiati. 2011. *Pergeseran Paradigma Pembangunan Pemberdayaan Menuju Pengarusutamaan Gender*. Solo :Cakrabooks.
- Usman, Sunyoto. 1998. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Walujo, Pardamean dan Basco. 1981. *Dialog : Indonesia Kini dan Esok*. Jakarta : Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (LEPPENAS).
- Yuliani. 2012. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di Kota Solok*. Tesis. Semarang : Fakultas Ilmu Sosial. UNNES.
- Zulhaeni, 2010. *Partisipasi Perempuan dalam Forum Warga: Studi tentang Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Melalui Forum Komunikasi RT, RW Kelurahan Imerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat*.  
[suaramerdeka.com./Serang-Kembangkan-Badan-Usaha-Milik-Desa.html](http://suaramerdeka.com/Serang-Kembangkan-Badan-Usaha-Milik-Desa.html).31 Oktober 2013